

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi reguler dan pembangunan. Fungsi reguler yang penting dan juga sekaligus tujuan pembangunan adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi pembangunan adalah sebagai inovator dan stabilisator. Pelaksanaan fungsi atau tugas pemerintahan ini memerlukan dana. Sumber utama dana ini adalah pajak. Oleh karena itu *tax reform* (pembaharuan perpajakan) tahun 1983 sangat penting karena memberikan fasilitas pada pelaksanaan fungsi pemerintah. *Tax reform* bersifat konseptual dan berfungsi *budgeter-regulerend-social*.

Pada tanggal 23 Oktober 1993, pemerintah mengeluarkan deregulasi sektor riil (Pakto 1993) yang bertujuan mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keunikan Pakto 1993 ini adalah merupakan tindak lanjut Ketetapan MPR-RI no. II/MPR/1993 tentang GBHN yang memberikan wewenang, tanggung jawab dan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dan melengkapi deregulasi sektor fiskal dan moneter sebelumnya. Pemerintah daerah bertugas memacu pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional, secara nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta disesuaikan dengan kemampuan daerah (GBHN 1993). Salah satu penerimaan utama pembangunan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tingkat pelunasan/pemungutan PBB Dati II Kotamadya Surabaya

pada tahun anggaran 1993/1994 relatif memprihatinkan, hanya dapat merealisasikan ±Rp.22 miliar dari target Rp.29,9 miliar (±73,6% dari target), dan pada tahun anggaran 1994/1995 membaik dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.29,3 miliar dari target Rp.31,9 miliar (91,8% dari target). Di Jawa Timur, pada tahun anggaran 1993/1994 peringkat pelunasan Dati II Kotamadya Surabaya nomer tiga puluh tujuh, atau terbawah, dan pada tahun anggaran 1994/1995 meningkat menjadi nomor 20. Dati II Kotamadya Surabaya adalah kota metropolitan nomer dua di Indonesia, sehingga phenomena ini menarik untuk diteliti.

Salah satu prinsip pemungutan perpajakan adalah beban pajak harus dapat dicover oleh penghasilan, artinya penghasilan seseorang harus lebih besar dari pada beban pengenaan pajaknya. Pengetahuan tentang beban pengenaan pajak PBB dan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) akan sangat membantu upaya-upaya peningkatan keberhasilan pemungutan pajak, termasuk PBB.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: "Apakah beban pengenaan PBB dan penghasilan WP merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan PBB di Kotamadya Surabaya?".

## 3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengenaan PBB merupakan faktor



penentu keberhasilan PBB atau tidak. Artinya apakah besarnya pengenaan PBB mempengaruhi pelunasannya atau tidak.

2. Untuk mengetahui apakah penghasilan WP merupakan faktor penentu keberhasilan PBB atau tidak. Artinya apakah besarnya penghasilan WP akan mempengaruhi pelunasan PBB-nya atau tidak.

#### 4. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dikemukakan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Beban pengenaan PBB tidak berpengaruh terhadap pelunasan PBB WP.
2. Besarnya penghasilan WP tidak berpengaruh terhadap pelunasan PBB WP.

#### 5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh besarnya pengenaan PBB terhadap pelunasan PBB WP.
2. Memberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pengaruh besarnya penghasilan WP terhadap pelunasan PBB WP.
3. Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.

#### 6. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang dimaksud WP adalah WP PBB

perorangan, bukan badan. Penelitiannya Agus Widodo Mardijuwono (1994) membuktikan bahwa data penghasilan badan sangat sulit untuk keluar. Data penghasilan ini sangat peka bagi WP PBB, khususnya WP PBB badan, sebab mengaitkan penghasilan WP dengan pajak-(PBB)-nya.

## 7. Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengasumsikan WP PBB bertindak rasional ekonomis, artinya WP PBB berorientasi mendapat beban pajak PBB sekecil-kecilnya dan mempunyai penghasilan sebesar-besarnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Fungsi Negara

Ada beberapa teori yang membahas legitimasi kekuasaan negara. Sebagian besar teori-teori tersebut berpendapat negara berkuasa karena mendapat mandat dari masyarakat (rakyat). Oleh karena itu negara bertugas untuk atau berfungsi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dann Sugandha (1992) menyitir hal ini sebagai berikut:

.... atas dasar rasio, Thomas Hobbes mengajarkan bahwa negara mendapatkan kekuasaannya dari masyarakat ....

.... John Locke, Rousseau, maupun Montesquieu melahirkan suatu sistem pemerintahan baru yang didasarkan pada hukum, demokrasi dan perwakilan rakyat (Sugandha, *ibid*).

Negara Republik Indonesia adalah negara dan pemerintahan pilihan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada negara, oleh karena itu salah satu fungsi Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Hal ini telah disitir dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea ke empat sebagai berikut:

... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...

Menurut Guritno Mangkoesoebroto (1987), dalam A. Tony Prasentiantono (Ed, 1994), negara berfungsi pokok:



(1) Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, (2) Menyediakan peradilan, (3) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, misalnya prasarana jalan, bendungan.

Sedangkan fungsi negara menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghozali adalah fungsi reguler dan agent of development (1988). Fungsi reguler ber-sub-unsur: (1.1) memajukan kesejahteraan rakyat (administrative state), (1.2) memelihara pertahanan dan keamanan (political state), (1.3) mengatur tata hukum bernegara dan bermasyarakat (legal state), dan (1.4) menjalin persahabatan dan hubungan luar negeri (diplomatical state). Sedangkan fungsi agent of development ber-sub-unsur: (2.1) stabilisator dan (2.2) inovator menemukan/menciptakan inovasi baru (ide-ide baru, rencana-rencana baru, tehnik-tehnik baru dan kebijakan-kebijakan baru).

Memajukan kesejahteraan rakyatnya adalah karakteristik umum negara-negara modern sekarang ini (Sugandha, 1992).

Pelaksanaan fungsi negara atau tugas-tugas pemerintahan ini memerlukan dana. Sumber-sumber dana yang merupakan hak pemerintah adalah (1) hak mencetak uang, (2) hak mengadakan pinjaman, (3) hak mengadakan pinjaman paksa (*sanering*), dan (4) hak untuk menarik pajak. Pajak merupakan sumber utama dana pelaksanaan fungsi negara atau tugas-tugas pemerintahan.

## 2. Perpajakan

Rochmat Sumitro (1977) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk-

kan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi ini diakui, diterima dan banyak disitir oleh penulis-penulis lain, seperti Tubagus Chairul Amachi Zandjani (1992), Munawir, S. (1992), Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi, Depdikbud (1990/1991), Lasmana (1989), Subekti (1985), Usman dan Subroto (1980). Hal penting dari definisi pajak tersebut, adalah pembayaran pajak rakyat ke kas negara harus berdasarkan hukum, dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum pelaksanaan fungsi negara.

Hukum kita menjelaskan hal ini sebagai berikut:

Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang (UUD 1945, ps1. 23, ayat 2).

Selanjutnya dalam memori penjelasannya disebutkan:

Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat (Ibid, memori penjelasan UUD 1945, ps1. 23, ayat 2).

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.

### 3. Tax Reform (Pembaharuan Perpajakan)

Undang-undang dan peraturan perpajakan warisan kolonial menempatkan WP sebagai obyek pajak bagi kepentingan pemerintah kolonial. Undang-undang dan peraturan perpajakan lama tadi walaupun telah diubah dan diperbaiki tetapi tetap tidak dapat



menghilangkan sama sekali sifat dan jiwa kolonialnya. Oleh karena itulah pada tahun 1983 pemerintah mengadakan tax reform, untuk menggantikan undang-undang dan peraturan perpajakan warisan kolonial, dengan mengesahkan tiga undang-undang pada tahun 1983 dan dua undang-undang pada tahun 1985. Undang-undang tersebut adalah UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No.8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No.12/1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No.13/1985 tentang Bea Meterai. Achmad Sjarifuddin Alsah (1992), salah seorang staf Direktorat Jenderal Pajak menyatakannya sebagai berikut:

The reform completely abolished the outdated Individual/Personal Income Tax and Corporate Income Tax Ordinances, both products of the colonized era, as well as various forms of withholding. It replaced the old tax system with a new, simple, and unified income tax system which applies to individuals and corporations.

Tax reform ini bertujuan mendorong keberhasilan perpajakan. Selanjutnya Achmad Sjarifuddin Alsah (1992) menyatakan tujuan tax reform sebagai berikut:

.... the Indonesian tax reform of 1983 was intended to raise the contribution of non-oil tax revenue in financing development.

Tabel No. 1 dibalik halaman ini menunjukkan keberhasilan tax reform.



Tabel No. 1 Trend penerimaan pajak 5 (lima) tahunan.

Keterangan	TA 1993/1994	TA 1988/1989	TA 1983/1984
Penerimaan pajak	Rp. 31,39 trl	Rp.10,56 trl	Rp. 3,73 trl

\* diolah dari APBN

\*\* TA = tahun anggaran

Tax reform ini menghasilkan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil dan berkepastian hukum (*rechssichereheit*)(UU NO. 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Tax reform ini berkarakteristik sederhana, menempatkan WP sebagai subyek (dulu WP hanya sebagai obyek), berazas pemerataan dan keadilan dalam pengenaan dan pembebanannya, berkepastian hukum, menghilangkan penyelundupan pajak dan penyalah-gunaan wewenang, dan meningkatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Sehingga sistem perpajakan sekarang ini mudah dipelajari, mudah dipahami dan mudah dipatuhi.

#### 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Salah satu produk tax reform, Undang-undang no.12 tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan satu-satunya pajak *property* di Indonesia, menggantikan dan menghapus undang-undang dan peraturan perpajakan dibawah ini:

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908/ Perpu 19/1959, seperti dirubah dan diganti dengan Undang-undang no.1 tahun 1961.
2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923, seperti dirubah dan diganti dengan Undang-undang no.29 tahun 1959.
3. Ordonansi Verponding 1928, seperti dirubah dan diganti dengan Undang-undang no.29 tahun 1959.
4. Pajak Kekayaan 1932, seperti dirubah dan diganti dengan Un-

dang-undang no.8 tahun 1967.

5. Ordonansi Pajak Jalan 1942.

6. Pasal 14 huruf j, k dan l Undang-undang no.11 Darurat tahun 1957, seperti dirubah dan diganti dengan Undang-undang no.1 tahun 1961.

7. Perpu no.11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, seperti dirubah dan diganti dengan Undang-undang no.1 tahun 1961.

Akibat tax reform ini PBB berazas sederhana, adil, mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah dihayati, berkepastian hukum, dan yang terpenting menghilangkan pengenaan pajak berganda atas obyek pajak properti.

Selain itu PBB bersifat:

1. Pajak kebendaan (obyektif/zakelijk), artinya pengenaan PBB didasarkan situasi dan kondisi obyek pajak; yaitu rumah dan tanah, bukan situasi dan kondisi subyek pajak (WP).
2. Dapat mengurangi penghasilan bruto WP, artinya beban pengenaan PBB dapat dimasukan sebagai komponen biaya yang mengurangi penghasilan netto sebelum kena pajak.
3. Pajak Tidak Langsung, artinya pengenaan PBB menjadi beban para pihak yang menikmati atau mendapat manfaat dari obyek pajak.
4. Bertarip proporsional sebesar 0,5% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
5. *Public investment* langsung, artinya penerimaan PBB seluruhnya hanya dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum.



Tabel dibawah ini menjelaskan pembagian dan penggunaan hasil penerimaan PBB.

Tabel No. 2 Pembagian hasil penerimaan PBB ( berlaku untuk tahun 1993 dan sebelumnya).

Keterangan:	Prosentase
Bagian Pusat:	10,0 %
Bagian upah pungut:	9,0 %
Bagian Dati I:	16,2 %
Bagian Dati II:	64,8 %
Jumlah total:	100,0 %

\* diolah dari UU No.12/1985

Keterangan:

1. Semua angka-angka ini (dalam rupiah) harus tercantum dalam APBN/APBD
2. Mulai tahun 1994 bagian Pusat (sebesar 10%) akan diserahkan kepada Daerah (Dati I & II) setelah dikurangi biaya administrasi perpajakan PBB.

Selanjutnya PBB berkarakteristik khusus:

1. penagihan PBB melalui aparat Pemerintah Daerah (Pemda). Direktorat PBB ikut menikmati atau memanfaatkan "kamukten" Pemda.
2. PBB mengadopsi data Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) dan Iuran Rehabilitasi Daerah (Ireda).
3. PBB dapat dipergunakan sebagai agunan pinjaman pembangunan daerah.

Hasil penerimaan PBB dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur (*public investment*) di daerah pembayar yang berdampak mikro dan makro ekonomi. Penilaian positif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini secara normatif akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya

membayar PBB, dan bila penilaiannya negatif akan sebaliknya. Pendapat Loekman Soetrisno (1994) tentang hal ini, dan relevan dengan lokasi penelitian ini di kota Surabaya, adalah sebagai berikut:

... membayar pajak adalah merupakan sumbangan mereka bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

... penduduk perkotaan akan selalu mengkaitkan pembayaran pajak dengan mutu pelayanan dari pihak aparat perpajakan maupun pihak pemerintah daerah setempat (Soetrisno, 1994, *ibid*).

Aspek kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur tidak diteliti dalam penelitian ini, mungkin akan diteliti dalam kesempatan lain atau oleh peneliti lain.

#### 5. Beban Pengenaan PBB dan Pendapatan WP

Di atas telah dijelaskan bahwa PBB adalah pajak kebendaan (obyektif/zakelijk), artinya pengenaan PBB didasarkan situasi dan kondisi obyek pajak, yaitu rumah dan tanah, bukan situasi dan kondisi subyek pajak (WP). Walaupun demikian karena beban pengenaan PBB dibayar dari pendapatan WP, maka PBB tetap mengurangi pendapatan WP. Tubagus Chairul Amachi Zandjani (1992) menyatakan sebagai berikut:

Dari jenis-jenis pungutan pajak yang telah dijelaskan di atas, apakah itu pajak konsumsi atau pajak atas benda maupun pajak atas pendapatan atau laba, jelas seluruhnya merupakan pengurangan atas kemampuan konsumsi maupun *saving* dari masyarakat.

Dengan perkataan lain beban pengenaan PBB mengurangi kenyamanan



hidup WP. F.X. Yuwono Prawirosetoto (1989), dalam Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dianalogkan dengan PBB, berpendapat tentang hubungan pajak dengan tingkat kenyamanan hidup WP sebagai berikut:

Pajak yang dikenakan terhadap barang konsumsi tertentu akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan seseorang karena daya beli orang tersebut berkurang akibat naiknya harga barang yang dikenakan pajak.

Jelas bahwa beban pajak berhubungan dengan pendapatan WP, dan berpengaruh terhadap keberhasilan pemungutan pajak. Salah satu prinsip pemungutan perpajakan adalah beban pajak harus dapat dicover oleh penghasilan, artinya penghasilan seseorang harus lebih besar dari pada beban pengenaan pajaknya. Penelitian United Nations tentang keberhasilan pemungutan pajak di beberapa negara Asia menyatakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemungutan pajak adalah faktor Tingkat Pendapatan per Kapita (United Nations Economics Commission for Asia and Far East, "Trends in Taxation in Asia", dalam Tubagus Chairul Amachi Zandjani, 1992).

Fuad Bawazier (1993), Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, menyatakan bahwa keberhasilan perpajakan berelimen Tax Law, Tax Policy, Tax Administration, dan Tax Payer. Oleh karena itu, penulis menetapkan elemen Tax Payer sebagai fokus penelitian ini, berdasar pada alasan elemen ini merupakan salah satu elemen keberhasilan perpajakan yang untuk fiskus bersifat uncontrollable. Elemen Tax Payer bersub-elemen pendapatan wajib pajak (WP) dan beban pajak, dan sub-sub-elemen lainnya. Pengetahuan tentang ini akan sangat membantu upaya-upaya

peningkatan keberhasilan pemungutan pajak.

## 6. Data PBB

Rencana penerimaan PBB merupakan salah satu komponen dan tercantum dalam APBN/D. Data PBB Kotamadya Surabaya, *collection rate* dan pendapatan per kapita tersaji dalam tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 3 Jumlah SPPT dan Pengenaan PBB dalam tahun 1994

KETERANGAN	Jumlah SPPT (WP)	Pengenaan (dlm ribuan rupiah)	
		Total	Rata-rata
Surabaya Pusat	57.579	Rp. 7.986.536	Rp. 138,71
Surabaya Utara	83.849	Rp. 5.087.447	Rp. 60,67
Surabaya Timur	134.984	Rp. 9.825.675	Rp. 72,79
Surabaya Selatan	121.454	Rp. 9.154.121	Rp. 75,37
Surabaya Barat	84.346	Rp. 5.186.222	Rp. 61,49
Kotamadya Surabaya	482.212	Rp.37.240.001	Rp. 77,23

\* diolah dari data Kantor Pelayanan PBB Surabaya

Tabel 4 Pengenaan PBB, Pendapatan per Kapita (atas dasar Harga Berlaku) dan *Collection Rate* PBB di Kotamadya Surabaya.

KETERANGAN	Pengenaan PBB (ribuan rph)	Pendapatan per Kapita(Hg.Blk)	Collection Rate (dlm prosen)
1987	---	884,48	---
1988	---	1.028,58	---
1989	---	1.826,82	---
1990	Rp.14.756.683	1.361,65	78,62 %
1991	Rp.17.203.609	1.604,99	65,36 %
1992	Rp.22.627.962	1.847,74	57,45 %
1993	Rp.24.033.099	2.236,11	70,31 %
1994	Rp.37.240.001	---	56,61 %

Sumber: Data Kantor Pelayanan PBB, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kotamadya se Jawa Timur 1985-1992, Kantor Statistik Prop. Jatim dengan Bappeda Tk.I Jatim, dan Surabaya dalam angka 1993, Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kantor Statistik Kotamadya Surabaya, diolah kembali.



Tabel 5 Pendapatan per Kapita di Kotamadya Surabaya

Tahun	Pendapatan per Kapita	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 1983
1987	884,48	682,56
1988	1.028,58	756,36
1989	1.826,82	825,85
1990	1.367,09	875,63
1991	1.611,82	945,26
1992	1.848,18	1.060,67

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kotamadya se Jawa Timur 1985-1992, Kantor Statistik Prop. Jatim dengan Bappeda Tk.I Jatim, dan Surabaya dalam angka 1993, Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kantor Statistik Kotamadya Surabaya.

Tabel 6 Jumlah SPPT dan Pengenaan PBB

KETERANGAN	Jumlah SPPT (WP)	Pengenaan (dim ribuan rupiah)	
		Total	Rata-rata
1990	382.685	Rp.14.756.683	Rp. 38,56
1991	398.149	Rp.17.203.609	Rp. 43,21
1992	404.413	Rp.22.627.962	Rp. 55,95
1993	418.101	Rp.24.033.099	Rp. 57,48
1994	482.212	Rp.37.240.001	Rp. 77,23

\* diolah dari data Kantor Pelayanan PBB Surabaya

Tabel 7 Pengenaan, Penerimaan dan *Collection Rate* PBB Kotamadya Surabaya (dalam ribuan rupiah dan rasio).

KETERANGAN	Pengenaan	Penerimaan	Collection Rate
1990	Rp.14.756.683	Rp.11.602.292	78,62 %
1991	Rp.17.203.609	Rp.11.244.589	65,36 %
1992	Rp.22.627.962	Rp.12.998.802	57,45 %
1993	Rp.24.033.099	Rp.16.898.648	70,31 %
1994	Rp.37.240.001	Rp.21.082.301	56,61 %

\* diolah dari data Kantor Pelayanan PBB Surabaya

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Bukti Empiris Penelitian Terdahulu

Pada Bab I di depan telah disebutkan bahwa penelitian perpajakan setelah Tax Reform masih sedikit, termasuk untuk pajak PBB. Dari kesedikitan penelitian itu, Kelly (1993) dan Guritno Mangkoesoebroto (1994) telah melaksanakan penelitian PBB. Penelitian Kelly bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian Guritno menyatakan bahwa penerimaan PBB masih kecil, dan ada hubungan fungsional antara pendapatan, nilai tanah, dan nilai rumah dengan collection rate PBB.

Dari penelitian dapat ditunjukkan adanya hubungan fungsional antara pembayaran PBB dengan nilai tanah, nilai rumah, dan pendapatan (Guritno Mangkoesoebroto, 1994).

Penerimaan pajak disebut dan diukur dengan suatu rasio yang disebut collection rate, yaitu tingkat perbandingan pembayaran pajak faktual pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan penetapan pajaknya. Pembayaran pajak faktual pada tahun yang sama dengan tahun penetapan pokok pajaknya adalah indikator tingkat kepatuhan WP. Salah satu keberhasilan perpajakan adalah keberhasilan penerimaan pajak yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kepatuhan WP, oleh karena itu makin tinggi tingkat collection rate-nya maka makin tinggi keberhasilan penerimaan pajaknya.

##### 2. Selayang Pandang Penelitian



Penelitian ini bertipologi studi survei, dengan tingkat kristalisasi eksploratif, lingkungan penelitian lapangan (*field-work*), berdimensi waktu cross-section, dan peneliti tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian (ex-post facto). Hipotesis yang digunakan mengacu kepada pendapat para ahli, dan mencoba membuktikannya secara empiris di kota Surabaya.

### 3. Seleksi dan Penetapan Sampel

Penelitian ini berdurasi waktu dua, pertama pada kurun waktu Agustus 1994 sampai dengan Januari 1995, dan kedua April 1995 sampai dengan Juli 1995. Sub-bab 4 menjelaskan alasan penetapan dua kurun waktu penelitian.

#### 3.1. Seleksi dan Penetapan Sampel kurun waktu pertama

Penetapan sampel memakai judgement sampling, sebab universe penelitian ini adalah WP PBB perorangan, sedangkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tidak membedakan WP PBB badan dengan perorangan. DHKP merupakan buku induk WP PBB, dan DHKP tidak membedakan WP PBB berdasarkan kegiatannya, tetapi membedakannya berdasarkan lokasi obyek pajak.

Kotamadya Surabaya bermotto "INDAMARDI" artinya kota industri, dagang, maritim dan pendidikan. Jumlah WP PBB di kota Surabaya sangat besar, lebih dari 480.000 WP PBB. Oleh karena itu penulis menetapkan WP PBB di Kelurahan Jemur Wonosari sebagai target populasi, karena berkarakteristik serupa dengan universe-nya, yaitu Kotamadya Surabaya dengan alasan sebagai berikut:

1. Kelurahan Jemur Wonosari mempunyai rumah tangga tradisional

(perkampungan asli), perumahan dinas instansi, perumahan real-estate swasta, dan perumahan real-estate pemerintah (Developer Yayasan Kas Pembangunan Pemda Kodya Surabaya).

2. Kelurahan Jemur Wonosari mempunyai industri kecil, menengah sampai besar.
3. Kelurahan Jemur Wonosari mempunyai super-market sampai dengan mracangan kecil.
4. Kelurahan Jemur Wonosari mempunyai sekolah dasar sampai dengan institut.

Sample frame penelitian kurun pertama ini tidak ada sebab target populasinya adalah WP PBB perorangan di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo. Kelurahan Jemur Wonosari mempunyai sepuluh rukun warga (10 RW), dari tiap-tiap RW diambil 4-5 unit sampel, sehingga sampel berjumlah 40 orang WP PBB perorangan.

### 3.2. Seleksi dan Penetapan Sampel kurun waktu kedua

Rumus mencari jumlah sampel (dari Scheaffer, 1979):

$$n = \frac{N p q}{(N-1) D + pq} \quad (1.1)$$

$$D = \frac{B^2}{4} \quad (1.2)$$

$n$  = jumlah sampel yang diinginkan

$N$  = Populasi Surabaya Pusat adalah 57.579 WP PBB

$p$  = Oleh karena proporsi awal tidak diketahui maka dipakai 0,5

$q$  =  $(1-p) = 0,5$

$B$  = bound of error atau kelonggaran kesalahan diperkirakan ber-interval-range tidak lebih dari 10% atau 0,1

$D$  =  $(0,1 * 0,1) : 4 = 0,0025$

Penulis menetapkan WP PBB perorangan di Surabaya Pusat



sebagai target populasi, dengan alasan Surabaya Selatan telah diwakili dalam penelitian kurun waktu pertama, Surabaya Pusat berbeban pengenaan rata-rata PBB-nya tertinggi, dan keberhasilan penerimaan pajak dengan nominal rupiah tertinggi lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang sedikit.

Beban pengenaan rata-rata di Surabaya Pusat sebesar Rp.138.710,- per WP PBB. Sample frame penelitian kurun waktu kedua ini adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Penetapan sampel berdasarkan perhitungan ini dan pengambilan sampel unit secara proporsional, menghasilkan responden potensial sebanyak 101 WP PBB. Setelah 4 WP PBB badan dan 4 WP PBB perorangan yang berkeberatan menjadi responden dikeluarkan maka responden kenyataannya sebanyak 93 WP PBB perorangan.

#### 4. Modus Komunikasi dan Metode Pengumpulan Data

Data berkarakteristik primer dan sekunder. Data sekunder adalah collection rate dan ketetapan PBB tahun 1994 dari sampel WP PBB perorangan terpilih. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Surabaya.

Data primer adalah disposable income sampel unit penelitian terpilih. Alat komunikasi dan pengumpulan data primer adalah kuesioner. Modus komunikasi dan metode pengumpulan data yang cocok dengan jenis data primer ini adalah kunjungan (visite).

Kunjungan survei pertama dilaksanakan pada bulan Agustus 1994, dan diulang kembali pada bulan September 1994. Tujuan pengulangan kembali pengumpulan data ini adalah untuk menilai konsistensi dan keandalan data jawaban responden, sebab data yang

tidak andal atau bias tidak dapat diolah lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Jangka waktu pelunasan PBB pada akhir bulan November, sedangkan pada bulan Desember 1994 dan Januari 1995 Kantor Pelayanan PBB sibuk, maka proses pengumpulan data sekunder collection rate dilakukan pada akhir Januari 1995. Hasil penelitian kurun waktu pertama ini menunjukkan semua responden melunasi PBB-nya.

Penetapan waktu dan alasan perluasan kedua ini telah dibahas di sub-bab 3 diatas.

Pada kurun waktu pertama penulis meminta bantuan pemuda karang taruna sebagai tenaga pewawancara, dan mahasiswa DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga untuk kurun waktu kedua. Supaya tidak terjadi bias akibat pengaruh pewawancara maka sebelumnya diadakan penataran dan acuan penuntun untuk para petugas pewawancara.

##### 5. Pembuatan dan Pengujian Awal Kuesioner

Kuesioner berisikan pertanyaan demografi, pertanyaan inti dan ruang uraian. Pertanyaan demografi bersifat close ended questionnaires. Pertanyaan inti yaitu disposable income bersifat open ended multi-item questionnaires. Salah satu metode pengukuran tingkat pendapatan masyarakat yang banyak dipakai para peneliti adalah disposable income, dan ditetapkan berkomponen belanja pangan, papan, transportasi, pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan telpon. Ruang uraian merupakan tempat untuk menampung pendapat bebas responden.

Pembuatan kuesioner secara bertahap, artinya pelepasan



kuesioner final ke responden setelah melewati tahap-tahap pengujian. Pengujian kuesioner dilakukan kepada teman-teman dosen di Universitas Airlangga, ke mahasiswa S1, dan mahasiswa DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Tujuan pengujian ini adalah untuk perbaikan ulang dan memastikan kuesioner dapat bekerja menangkap indikator-indikator penelitian. Kuesioner ini berskala rasio dan bernominal rupiah.

#### 6. Upaya-upaya untuk Mendapatkan Respon yang Wajar

Aktivitas petugas pewawancara disupervisi secukupnya, dengan cara mengadakan pertemuan rutin mingguan antara penulis dengan para petugas, sehingga setiap kesulitan dapat dicari jalan keluarnya. Selain itu secara acak penulis mengecek hasil kuesioner kepada para responden dengan cara kunjungan maupun telpon, dan menjanjikan bantuan konsultasi perpajakan gratis.

#### 7. Keandalan dan Kesahihan Alat Pengukur

Keandalan (reliability) didefinisikan sebagai suatu derajat dimana alat pengukur memberikan hasil ukur yang konsisten. Koefisien keandalan menggambarkan apakah peneliti telah tepat mengukur item-item harapan untuk dapat menginterpretasikan pernyataan tentang perbedaan-perbedaan individu yang ada. Koefisien keandalan adalah suatu indeks ketepatan dari nilai yang diperoleh. Keandalan perlu tetapi tidak cukup untuk mengkondisikan kesahihan data.

Kesahihan (validity) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana alat pengukur dapat mengukur apa yang sebenarnya harus

diukur. Supaya suatu pengukuran sah, maka alat pengukur selain harus dapat diandalkan, juga harus berkesahihan konstruk, isi dan prediksi (construct validity, content validity dan predictive validity). Bambang Sudibyo (1985) menjelaskan ketiga kesahihan itu sebagai berikut:

Construct validity refers to whether the instrument really measures the intended construct -- the abstract variable being measured -- and not some other irrelevant construct (Nunally, 1978).

Determining the number and the choice of items is the issue of content validity. Content validity refers to whether the universe of possible items that measure the construct has been appropriately sampled and included in the instrument (Nunally, 1978).

Predictive validity is at issue when the purpose of measurement is to use the scores produced to predict some important form of behavior of the variable being studied.

## 8. Analisis Statistik

Variabel bebas ketetapan PBB dan variabel gayut collection rate merupakan data sekunder, dan berasal dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan laporan bank persepsi tentang bukti pelunasan pajak di Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) Surabaya. Penulis telah mengadakan observasi dan mereview sistem administrasi kantor KPPBB seperlunya, dan dapat menyimpulkan bahwa sistem tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu tidak ada pengujian keandalan dan kesahihan data sekunder tersebut.

### 8.1. Analisis statistik kurun waktu pertama

Variabel gayut penelitian yaitu collection rate dari 40 responden bernilai sama 100%, akibatnya:



1. Data bias dan tidak merupakan kurve normal, maka tidak dilakukan pengujian dan analisis terhadap data bias karena akan menghasilkan kesimpulan yang tidak sah.
2. Hipotesa penelitian tidak dapat dibuktikan, dan tidak menghasilkan kesimpulan apapun.

Oleh karena itu penulis mengadakan perluasan penelitian.

## 8.2. Analisis statistik kurun waktu kedua

Perluasan penelitian kurun waktu kedua ini berkesesuaian dengan tujuan awal penelitian ini yaitu meneliti ada tidaknya pengaruh pendapatan WP PBB perorangan dan beban pengenaan PBB perorangan terhadap tingkat pelunasan PBB perorangan.

Variabel gayut collection rate berkarakteristik khusus yaitu "lunas" atau "tidak", maka terhadap jenis data seperti ini tidak dapat diadakan uji normalitas. Pengujian linieritas data menunjukkan fungsi bersifat linier.

Hipotesis penelitian dirubah menjadi  $H_0$  (H<sub>0</sub>) sebagai berikut:

$H_0-1$  : Beban pengenaan PBB tidak berpengaruh terhadap pelunasan PBB.

$H_0-2$  : Penghasilan WP PBB tidak berpengaruh terhadap pelunasan PBB.

Analisis statistik menggunakan program SPS Sutrisno Hadi Universitas Gadjah Mada. Analisis regresi menghasilkan nilai statistik yang tampak pada tabel nomor 8 dibalik halaman ini.

Tabel nomor 8 Analisis Regresi

Variabel gayut	Variabel bebas	Koefisien Regresi	t	p
Y	X <sub>1</sub>	0,104176	1,073	0,286
Y	X <sub>2</sub>	-0,050434	-0,616	0,547

Keterangan: X<sub>1</sub> = Disposable Income  
 X<sub>2</sub> = Ketetapan PBB tahun 1994  
 Y = Collection Rate

Hasil ini membuktikan H<sub>0</sub>-1 dan H<sub>0</sub>-2 diterima, dan H<sub>a</sub>-1 dan H<sub>a</sub>-2 ditolak.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Penelitian

Hasil dan uraian analisis statistik di bab III menyimpulkan bahwa:

1. Beban pengenaan PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya.
2. Pendapatan atau penghasilan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya.

Selain itu dari kuesioner uraian bebas, para responden menyatakan bahwa penetapan PBB tahun 1994 terlalu tinggi.

#### 2. Pembahasan

Pemrosesan komputer menghasilkan ketelitian yang lebih tinggi, maka Kaidah Uji Hipotesis Penelitian (KUHP) dapat disusun lebih teliti. Artinya taraf signifikansinya dapat ditingkatkan dari tiga menjadi lima taraf, yaitu sangat signifikan (*highly significant*), signifikan (*significant*) dan sangat tidak signifikan (*highly insignificant*), menjadi lebih detil dengan lima taraf signifikansi, yaitu sangat signifikan, signifikan, cukup signifikan, kurang signifikan, dan tidak signifikan.

Oleh karena dari keluaran komputer kita dapat mengetahui besarnya  $p$  secara teliti, maka KUHP-nya juga dapat kita susun lebih teliti lagi (Sutrisno Hadi, 1995).

Berdasarkan itu, dapat disimpulkan bahwa walaupun besarnya sumbangan beban pengenaan PBB perorangan dan penghasilan WP PBB

perorangan terhadap penerimaan PBB sebesar 1,5% (penerimaan PBB selebihnya karena faktor-faktor lain), tetapi tingkat korelasinya cukup significant ( $\alpha \leq 15\%$ ).

Bab II menguraikan antara lain pengenaan pajak akan mengurangi kenikmatan ekonomis WP, karena pajak akan mengurangi pendapatan. Penelitian ini tidak menggugurkan tesis di atas, sebab fokus penelitian ini adalah pengaruh beban pajak dan pendapatan WP terhadap keberhasilan penerimaan pajak, bukan kepuasan ekonomis WP.

Selain itu Guritno Mangkoesobroto et al (1994) membuktikan bahwa ada hubungan fungsional antara beban PBB dengan pendapatan. Sama dengan di atas, fokus penelitian ini bukan membuktikan hubungan antara beban pajak dengan pendapatan, tetapi hubungan beban pajak dan pendapatan dengan keberhasilan penerimaan pajak.

Faktor-faktor penentu keberhasilan perpajakan atau penerimaan pajak adalah Tax Law, Tax Policy, Tax Administration, dan Tax Payer. Beban, pajak dan penghasilan WP merupakan salah satu faktor Tax Payer, atau sub-faktor penentu keberhasilan penerimaan pajak. Uraian faktor-faktor penentu keberhasilan perpajakan lainnya, antara lain:

1. Undang-undang perpajakan secara eksplisit menyatakan bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan (Law Enforcement).
2. Kebijakan pemerintah daerah yang mengkaitkan layanan umum dengan pelunasan pajak dan kewajiban-kewajiban lain.
3. Pembebasan obyek pajak tertentu atau pembebasan pajak obyek pajak senilai tertentu.
4. Tertib administrasi administrasi perpajakan, antara lain



pelaporan, penetapan, dan penagihan.

5. Faktor-faktor yang melekat pada WP, selain beban pajak dan pendapatan WP, seperti faktor demografi, kesadaran bernegara, kesadaran perpajakan, filosofi keadilan perpajakan, pemahaman dan kesadaran hukum, persepsi terhadap pelaksanaan aktivitas fiskus, perlawanan perpajakan, persepsi WP atas aktivitas fiskus dan WP lain, dan *Tax Planning*.

Sekali lagi, penelitian ini tidak menggugurkan atau menguji tesa tentang pendapatan dengan pajak, dan penelitiannya Guritno Mangkoesoebroto, tetapi melengkapinya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Beban pengenaan PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya.
2. Pendapatan atau penghasilan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya.

#### 2. Saran

Penelitian ini sebaiknya ditindak-lanjuti dengan penelitian-penelitian lanjut. Penelitian lanjutan dapat di kategorikan sebagai berikut:

1. Perluasan lokasi penelitian di kota kecil, menengah dan besar lain di Indonesia, bila penelitian tetap berfokus pada pengaruh beban pajak dan pendapatan WP terhadap keberhasilan penerimaan pajak.
2. Perluasan fokus faktor-faktor perpajakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alsah, Achmad Sjarifuddin (1992). The Effects of the 1983 Indonesian Tax Reform on the Effective Tax Rates on Capital. Disertasi S3, Department of Economics, Indiana University at Bloomington.
- Bawazier, Fuad (1993). Key Note Speaker dalam Seminar "Peran Pajak dalam Pembangunan dan Peningkatan Ekspor Non-migas", Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Chairul Amachi, Tubagus, Zandjani (1992). Perpajakan. PAU-EK-UI dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Guritno Mangkoesoebroto, dan A. Tony Prasetyantono (Ed.) (1994). Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno dan Seno Pamardiyanto (1995). Buku Manual SPS (Seri Program Statistik) Paket MIDI. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kelly, Roy (1993). Property Tax Reform in Indonesia: Applying a Collection-Led Implementation Strategy. Australian National University, Canberra: Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), Vol. 29, No.1, April 1993, pp. 85-104.
- Lasmana, Eko. (1989). Pengantar Perpajakan Indonesia. Badan Penerbitan Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Mardijuwono, Agus Widodo (1994). Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan type-type bukti dan jumlahnya dalam audit laporan keuangan. Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Merriman, David (1987). The Control of Municipal Budgets. Qourum Books, New York.
- Munawir, S. (1992). Perpajakan. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Prawirosetoto, Yuwono, F.X. (1989). Tinjauan Aspek Mikro dan Makro Kebijaksanaan Keuangan Negara di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Moneter, volume 1, nomor 2: hlm. 63-86.
- Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi, Depdikbud (1990/1991). Perpajakan. P1A, Depdikbud, Jakarta.
- Republik Indonesia (1945). Undang-undang Dasar 1945. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- . (1983). Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara RI, Jakarta.

- Republik Indonesia (1985). Undang-undang No. 12 tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (Lembaran Negara No. 68 tahun 1985, Penjelasan dalam Lembaran Negara No. 3312). Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- . (1994). Undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- . (1994). Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali (1988). Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. BPFE, Yogyakarta.
- Scheaffer, Richard L., William Mendenhall, dan Lyman Ott (1979). Elementary Survey Sampling, 2nd edition. Duxbury Press, North Scituate, Massachusetts.
- Schroeder, Richard G., Levis D. McCullers and Myrtle Clark (1987). Accounting Theory: Text and Readings, 3rd edition. John Wiley and Sons, New York.
- Soetrisno, Loekman (1994). Optimalisasi Pemungutan PBB di Perkotaan: Suatu Perspektif Sosiologis. Direktorat Jenderal Pajak, Diskusi terbatas "Penyempurnaan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan serta pemungutan kembali Bea Balik Nama Tanah atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan", Jakarta.
- Subekti, R. Tobias (1985). Dasar-dasar Perpajakan. Penerbit Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudiby, Bambang (1985). The Adequacy of CPAs' Understanding of The Relative Seriousness of Alpha and Beta Risks in Statistical Audit Sampling. Disertasi S3, The University of Kentucky, Lexington, Kentucky.
- Sugandaha, Dann (1992). Pengantar Administrasi Negara. Intermedia, Jakarta.
- Suryowibowo, Karsono (1989). Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Prospekti. *Jurnal Keuangan dan Moneter*, vol.1, nomor 2, Oktober 1989.
- Usman, B. dan K. Subroto (1980). Pajak-pajak Indonesia, cetakan ke II. Yayasan Bina Pajak, Jakarta.



DAFTAR LAMPIRAN:

Surat Perijinan



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
 DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
 JL. PEMUDA NO. 5 TELP. 43020 45673  
 SURABAYA

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research

Nomor : 072/ 3796 /300/ 1994

- Membaca : 1. SRT. KETUA LEMPEN UNAIR SBY 2 AGUSTUS '94 No. 573/PT03, H8/N/1994 0102  
 2. SRT. KAKANWIL IX DIJEN PAJAK JATIM 9 AGUSTUS '94 No. S-23257/W.PJ.09/BG  
 3. SRT. WALIKOTAMADYA KDH TK. II SBY 8 AGUSTUS '94 No. 072/1653/402.8.02/9
- Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972  
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Guh./187/1972.

L 4.

dengan ini menyatakan TIDAK keberatan dilakukan survey / research oleh :

Nama Penanggung Jawab

DRS. EC. BAMBANG SUHARDITO, AK  
 KETUA PENELITI LEMBAGA PENELITIAN UNAIR SURABAYA  
 JL. JEMURSARI IIA/131 SURABAYA

Alamat

Thema / Acara survey / research

" ANALISIS BEBERAPA FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTAMADYA SURABAYA "

Daerah / Tempat dilakukan survey / research

KOTAMADYA SURABAYA

Lamanya survey / research

3 (TIGA) BULAN TERHITUNG TGL. SURAT DIKELUARKAN.

Mengikuti / Peserta survey / research

1. DRS. EC. MOCH. LUTFIE MISBACH, MSi
2. DRS. AGUS WIDODO M, M.Si, AK.
3. DRS. DJOKO DEWANTORO, AK.
4. DRS. HENDARJATNO, AK.

4. SRT. KETUA BAPPEDA TK. I JTM 6 AGUSTUS '94 No. 072/329/201.1/94

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian setempat.
2. Menaatii ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga sata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucian serta menghindari pernyataan-pernyataan belik dengan lisan ataupun tulisan/tukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey/research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey/research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey/research.
6. Dalam jangka waktu suatu bulan setelah selesai dilakukannya survey/research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :

1. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
2. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur.
3. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan.
4. Kanwil/Direktorat/Dinas/Jawatan/Lembaga yang bersangkutan.
5. ....

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa penanggung surat keterangan ini tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas.

TEMBILAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR  
(GEDUNG KEUANGAN NEGARA)  
JALAN INDRAPURA NO. 5 TROMOL POS No. 804 SURABAYA 60008

TELEPON : (031) - 335891 - 335892

Fax : (031) - 23858

Tel. 1

Nomor : S-2325/WPJ.09/BG.0102/1994

Surabaya, 5 Agustus 1994

Sifat : -

K E S A D A

Lampiran : -

Perihal : Pertimbangan Survey/Research  
untuk Drs. Ec. BAMBANG  
SUHARDITO, Ak Ketua Peneliti  
Lembaga Penelitian UNAIR  
Surabaya.

Yth. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
DAERAH T.K.I JAWA TIMUR  
U.p. KASUBDIT TIBUM  
Di- SURABAYA.

Menunjuk surat Saudara Nomor : 072/3681/303/1994 tanggal 5 Agustus 1994 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan yang bersangkutan mengadakan survey/research untuk penyusunan penelitiannya.

Berdasarkan pertimbangan teknis yang disesuaikan dengan judul penelitian dan lain-lainnya, maka kami tentukan bahwa survey/research tersebut dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Surabaya Jl. Indrapura No.5 Surabaya.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH IX  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TIMUR  
Sdr. LA BACLAN UNY

Sdr. SUPRIYADI  
031-335891

Tindakan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Pelayanan PBB Surabaya di Surabaya;
2. Yth. Rektor Universitas Airlangga di Surabaya;
3. Yth. Sdr. Drs. Ec. BAMBANG SUHARDITO, Ak Ketua peneliti Lembaga Penelitian UNAIR di Surabaya.

**DAFTAR LAMPIRAN:**

**Kuesioner**





Surabaya, 1 September 1994

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Warga Surabaya

di

Tempat

Perihal: permohonan pengisian daftar pertanyaan

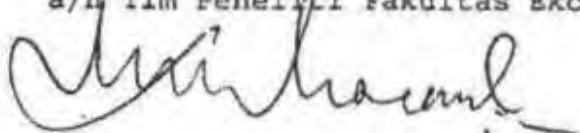
Dengan hormat,

Kami, Tim Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga sedang mengadakan penelitian, sebagai salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan penelitian ini, kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab daftar pertanyaan terlampir. Data tersebut akan diolah dalam satu kesatuan, dan kami akan tetap merahasiakan identitas Bapak/Ibu sebagai sumber data.

Atas kesediaan, bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu Bapak/Ibu yang sangat berharga, kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,

a/n Tim Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga



Drs. Bambang Suhardito, Ak.

**KUESIONER**

**Petunjuk Umum Pengisian:**

AGAR TIDAK ADA KESULITAN DALAM ANALISIS DAN PENAFSIRAN DATA, MAKA KAMI MOHON DENGAN HORMAT KEPADA BAPAK/IBU UNTUK:

- A. melengkapi isian di bawah ini dan/atau menjawab semua pertanyaan.
- B. satu pertanyaan satu jawaban.
- C. bila menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, harap memilih jawaban yang paling sesuai dengan atau yang paling mendekati pendapat Bapak/Ibu.
- D. mohon Bapak/Ibu memberi tanda (silang/cawang/lingkaran) pada tempat yang telah tersedia.

1. Nama Bapak/Ibu: .....

2. Alamat: .....

3. RT  RW

4. Usia kepala keluarga:   tahun

5. Jabatan di lembaga kerja: .....

6. Pendidikan terakhir:

Tidak tamat SD	SD	SLTP	SLTA	S0/D3	S1/D4	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8



7. Apa status pekerjaan utama Bapak/Ibu ?

1. Pegawai Negeri Sipil
2. ABRI
3. Pegawai BUMN/D
4. Usaha swasta sendiri
5. Pegawai perusahaan swasta
6. Pensiunan/Pensiunan Janda
7. Lainnya, sebutkan: . . . . .

8. Apa sektor pekerjaan utama Bapak/Ibu ?

1. Dagang
2. Manufaktur
3. Keuangan
4. Jasa
5. Informal

9. Apakah alamat KTP Bapak/Ibu sama dengan alamat tempat tinggal/ usaha di sini ?

1. Ya.
2. Tidak.

10. Sudah berapa tahun Bapak/Ibu bertempat tinggal di sini ?

1. ≤ 2 th
2. > 2 s/d 4 th
3. > 4 s/d 7 th
4. > 7 th

11. Bila alamat ini adalah perusahaan Bapak/Ibu, sudah berapa tahun perusahaan Bapak/Ibu beroperasi di sini ?

1. ≤ 5 th
2. > 5 s/d 10 th
3. > 10 s/d 20 th
4. > 20 th

12. Bagaimana status tempat tinggal/perusahaan Bapak/Ibu ini ?
1. Kontrak/Sewa
  2. Hak Guna Usaha
  3. Hak Guna Bangunan
  4. Hak Milik
  5. Lainnya, sebutkan: . . . . .
13. Selain alamat ini apakah Bapak/Ibu mempunyai tempat tinggal/ rumah/toko/gudang/industri/perusahaan/tanah di tempat lain ?
1. Ya
  2. Tidak
14. Berapa rupiah rata-rata belanja kebutuhan pangan harian Bapak/Ibu ?
- Rp. . . . . /per hari
15. Selain belanja kebutuhan pangan harian, apakah Bapak/Ibu juga masih memerlukan berbelanja kebutuhan pangan secara bulanan ?
1. Ya
  2. Tidak
- (Bila jawabannya tidak, lanjutkan ke nomor 17)
16. Berapa rupiah rata-rata belanja kebutuhan pangan bulanan Bapak/Ibu ?
- Rp. . . . . /per bulan
17. Berapa rupiah rata-rata belanja kebutuhan bahan bakar untuk memasak (gas dan/atau minyak tanah) Bapak/Ibu ?
- Rp. . . . . , selama . . . . . hari sekali
18. Berapa rupiah rata-rata pengeluaran/pembayaran listrik Bapak/Ibu ?
- Rp. . . . . /per bulan



19. Apakah alamat ini menjadi pelanggan PDAM ?
1. Ya
  2. Tidak
20. Baik sebagai pelanggan PDAM maupun bukan, berapa rupiah rata-rata pengeluaran/pembayaran air bersih Bapak/Ibu ?
- Rp. . . . . /per bulan
- atau
- Rp. . . . . /per hari
21. Apakah alamat ini mempunyai telepon ?
1. Ya
  2. Tidak
22. Berapa rupiah rata-rata pengeluaran/pembayaran telepon Bapak/Ibu ?
- Rp. . . . . /per bulan
23. Berapa rupiah rata-rata pengeluaran harian untuk transportasi Bapak/Ibu dan seluruh anggota keluarga ke kantor dan/atau ke sekolah ?
- Rp. . . . . /per hari
24. Berapa rupiah rata-rata pengeluaran bulanan untuk kesehatan, baik untuk pengobatan maupun untuk penjagaan kesehatan seluruh anggota keluarga Bapak/Ibu ?
- Rp. . . . . /per bulan
25. Berapa rupiah rata-rata pengeluaran bulanan biaya pendidikan, baik sekolah formal maupun kursus untuk Bapak/Ibu dan seluruh anggota keluarga ?
- Rp. . . . . /per bulan
26. Berapa rupiah rata-rata pengeluaran bulanan biaya perbaikan dan renovasi rumah Bapak/Ibu ?
- Rp. . . . . /per bulan

27. Apakah Bapak/Ibu, baik melalui KPR BTN maupun lainnya, juga mengangsur rumah di tempat lain ?

1. Ya
2. Tidak

(Bila tidak lanjutkan ke nomor 29)

28. Berapa rupiah rata-rata angsuran bulanan rumah di tempat lain tersebut ?

Rp. . . . . /per bulan

29. Apakah Bapak/Ibu mampu menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung, baik melalui bank, arisan maupun tabungan di rumah?

1. Ya
2. Tidak

30. Berapa rupiah rata-rata kemampuan Bapak/Ibu menabung per bulan ?

Rp. . . . . /per bulan

Komentar uraian Bapak/Ibu lainnya (kalau ada):

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu !

Salam hormat,

a/n Tim Peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga

Drs. Bambang Suhardito, Ak.



DAFTAR LAMPIRAN:

Analisis Regresi Kurun Waktu Kedua



Cetakan Ke - 1 / 1

LEMBAR KETERANGAN:

Paket : SPS (Serj Program Statistik)  
 Modul : Anareg 6 (Pilihan Khusus)  
 Program : Analisis Regresi Umum  
 Edisi : Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto  
 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia  
 Versi IBM/IN, Hak Cipta (c) 1995 Dilindungi UU

Nama Pemilik : Bambang Suhardito  
 Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi, Universitas AIRLANGGA  
 Alamat : Jl. Jemursari II/26 (Blok A/13), Surabaya

Nama Peneliti : Bambang Suhardito  
 Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga  
 Tgl. Analisis : 11-16-1995  
 Nama Berkas : opf94-3  
 Nama Dokumen : OPF-A'

Nama Ubahan Bebas X1 : Disposable Income  
 Nama Ubahan Bebas X2 : Ketetapan PBB 1994  
 Nama Ubahan Gayut Y : Collection Rate

Ubahan Bebas X1 = Rekaman Nomor : 1  
 Ubahan Bebas X2 = Rekaman Nomor : 2  
 Ubahan Gayut Y = Rekaman Nomor : 3

Cacah Kasus Semula : 93  
 Cacah Data Hilang : 0  
 Cacah Kasus Jalan : 93

\*\* MATRIKS INTERKORELASI

r	x1	x2	y
x1	1.000	0.125	0.104
p	0.000	0.231	0.679
x2	0.125	1.000	-0.050
p	0.231	0.000	0.637
y	0.104	-0.050	1.000
p	0.679	0.637	0.000

p = dua-ekor.



## \*\* KOEFISIEN BETA DAN UJI-t-NYA

X	Beta (b)	Stand. Beta (a)	SB(b)	t	p
0	0.801818				
1	0.000127	0.104176	0.000118	1.073	0.286
2	-0.000000	-0.050434	0.000000	-0.616	0.547

Galat Baku Est. = 0.346  
 Korelasi R = 0.122  
 Koef. Det. (R) = 0.015

## \*\* TABEL RANGKUMAN ANALISIS REGRESI :

Sumber	JK	db	RK	F	p
Regresi	0.163	2	0.081	0.682	0.512
Residu	10.745	90	0.119	--	--
Total	10.908	92	--	--	--

## \*\* PERBANDINGAN BOBOT PREDIKTOR

Ubahan X	Korelasi Lugas $r_{xy}$	Korelasi Parsial $r_{xy-sisa\ x}$	Bobot Sumbangan Efektif $SE\%$
1	0.104	0.111	1.169
2	-0.050	0.064	0.325
Total	--	--	1.494

\*\* TABEL DATA : OPF94-3

Kasus	X1	X2	Y	Kasus	X1	X2	Y
1	278.500	63344	1.000	41	555.000	69850	1.000
2	861.170	19236	1.000	42	469.500	6144	1.000
3	652.000	27044	0.000	43	139.000	8200	1.000
4	825.000	400271	0.655	44	115.000	25235	1.000
5	235.700	34992	1.000	45	485.000	134790	1.000
6	325.000	13851	1.000	46	243.300	31810	1.000
7	517.830	34310	1.000	47	228.000	28641	1.000
8	758.500	241214	1.000	48	267.500	10442	1.000
9	162.350	8372	1.000	49	375.000	12620	0.000
10	533.800	14200	1.000	50	162.500	40260	1.000
11	427.500	16652	1.000	51	560.000	2944	1.000
12	231.000	37400	0.947	52	267.000	132800	0.554
13	699.170	134943	1.000	53	141.000	17412	1.000
14	340.000	16332	1.000	54	505.000	59325	1.000
15	373.000	618284	1.000	55	635.000	18560	0.000
16	109.700	44334	0.000	56	591.700	99460	1.000
17	80.000	7000	1.000	57	1,555.000	33032	1.000
18	214.290	36806	0.000	58	163.000	14928	1.000
19	211.600	6800	1.000	59	178.000	1920	1.000
20	300.000	195000	1.000	60	980.170	26314	1.000
21	1,190.000	7916	1.000	61	573.300	15204	1.000
22	113.000	11392	1.000	62	227.500	8456	1.000
23	262.500	59652	0.000	63	582.500	23344	1.000
24	789.500	279750	0.797	64	300.000	57233	0.000
25	836.500	220720	1.000	65	151.000	14832	1.000
26	804.500	5845	1.000	66	143.000	10560	1.000
27	551.500	16912	1.000	67	212.000	90500	0.344
28	299.500	1545	1.000	68	326.500	22600	1.000
29	290.000	47985	1.000	69	238.000	13300	1.000
30	286.000	5356	1.000	70	363.700	2060	1.000
31	750.000	46884	0.750	71	327.500	60124	1.000
32	72.000	98681	1.000	72	128.800	89664	1.000
33	15.000	1339	1.000	73	106.000	1968	1.000
34	327.500	21188	1.000	74	670.000	16424	1.000
35	587.000	62828	1.000	75	180.240	13776	1.000
36	401.300	7725	0.000	76	358.170	1260	1.000
37	300.500	6797	1.000	77	1,015.000	20465	1.000
38	214.000	35135	1.000	78	569.170	15976	0.000
39	564.500	21120	1.000	79	1,023.000	24290	1.000
40	955.000	11268	1.000	80	376.500	11720	1.000



(sambungan)

Kasus	U1	U2	U3
81	329.000	5000	1.000
82	149.000	18518	1.000
83	466.000	106056	1.000
84	229.500	59240	1.000
85	523.300	9464	1.000
86	124.000	1536	1.000
87	187.830	66124	0.000
88	1,565.000	10176	1.120
89	156.300	61632	0.000
90	277.500	85961	0.554
91	258.000	2870	1.000
92	453.700	54840	0.607
93	308.300	106238	0.000

**DAFTAR LAMPIRAN:**

**Analisis Uji Asumsi Linieritas**





Cetakan Ke - 1 / 1

Paket : SPS (Seri Program Statistik)  
Modul : Uji Asumsi  
Program : Uji Linieritas  
Edisi : Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia  
Versi IBM/IN, Hak Cipta (c) 1995 Dilindungi UU

Nama Pemilik : Bambang Suhardito  
Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi, Universitas AIRLANGGA  
A l a m a t : Jl. Jemursari II/26 (Blok A/13), Surabaya

---

Nama Peneliti : Bambang Suhardito  
Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga  
Tgl. Analisis : 11-22-1995  
Nama Berkas : opf94-3  
Nama Dokumen : ul

Nama Ubahan Bebas X1 : Disposable Income  
Nama Ubahan Bebas X2 : Ketetapan PBB 1994  
Nama Ubahan Gayut Y : Collection Rate

Ubahan Bebas X1 = Rekaman Nomor : 1  
Ubahan Bebas X2 = Rekaman Nomor : 2  
Ubahan Gayut Y = Rekaman Nomor : 3

Cacah Kasus Semula : 93  
Cacah Data Hilang : 0  
Cacah Kasus Jalan : 93

## \*\* TABEL RANGKUMAN ANALISIS REGRESI : X1 dengan X3

Sumber	Derajat	JK	db	RK	F	p
Regresi	Ke-1	0.118	1	0.118	0.998	0.679
	Ke-2	0.219	2	0.109	0.920	0.596
Residu	Ke-1	10.789	91	0.119	--	--
	Ke-2	10.689	90	0.119	--	--
Total		10.908	92	--	--	--

## \*\* TABEL RANGKUMAN ANAVA POLINOMIAL : X1 dengan X3

Sumber	Derajat	Rj	db	Var	F	p
Regresi	Kel	0.011	1	0.011	0.998	0.679
Residu		0.989	91	0.011	--	--
Regresi	Ke2	0.020	2	0.010	0.920	0.596
Beda	Ke2-Kel	0.009	1	0.009	0.844	0.636
Residu		0.980	90	0.011	--	--

Korelasinya Linier



\*\* TABEL RANGKUMAN ANALISIS REGRESI : X2 dengan X3

Sumber	Derajat	JK	db	RK	F	p
Regresi	Ke-1	0.028	1	0.028	0.232	0.637
	Ke-2	0.322	2	0.161	1.370	0.258
Residu	Ke-1	10.880	91	0.120	--	--
	Ke-2	10.586	90	0.118	--	--
Total		10.908	92	--	--	--

\* TABEL RANGKUMAN ANAVA POLINOMIAL : X2 dengan X3

Sumber	Derajat	R <sup>2</sup>	db	Var	F	p
Regresi	Kel	0.003	1	0.003	0.232	0.637
Residu		0.997	91	0.011	--	--
Regresi	Ke2	0.030	2	0.015	1.370	0.258
Residu	Ke2-Ke1	0.027	1	0.027	2.503	0.113
Residu		0.970	90	0.011	--	--

Korelasinya Linier

**DAFTAR LAMPIRAN:**

**Responden Kurun Waktu Pertama**





## DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN KURUN WAKTU PERTAMA

01. Ir. Puspa Erawati	Jemursari VII 19
02. Insan Wiseso	Jemursari II 21
03. M. Syayid	Wonocolo gg Pabrik Kulit 23
04. Saroni	Wonocolo gg Pabrik Kulit 52
05. Kusrin	Wonocolo gg Zubair 5
06. Fatchan bin Hasan	Wonocolo gg Pabrik Kulit 64
07. Madasir	Wonocolo gg Pabrik Kulit 10
08. Umi Hanik	Wonocolo gg Pabrik Kulit 11
09. Supardi Anandarno	Wonocolo Pabrik Kulit 95
10. Fuad M. Tohir	Wonocolo Utara V/10
11. Rochimah	Jemur Wonosari gg Lebar 9
12. Marwah B. Patimah	Jemur Wonosari gg Lebar 50
13. Badriyah	Jemur Wonosari gg Lebar 110
14. Mahmudah	Jemur Wonosari gg Lebar 53
15. Muali	Jemur Wonosari gg Lebar 169
16. Sakur	Wonocolo IV/8
17. H. Imam Machmud	Wonocolo VIII/1A
18. Tulus	Wonocolo VI / 15A
19. Rohumah	Wonocolo gg Benteng II/5
20. Rapet Martini	Jemur Wonosari IAIN 17
21. Diana Veronica Gunawan	Wonocolo gg Pertolongan 9B
22. Robiatun	Jemur Wonosari gg Buntu 8
23. C. Rahmanullah	Jemur Wonosari gg Buntu 36
24. Siti Fatimah	Jemur Wonosari gg Kyai Mualim 4

25. Sutrisno	Jemur Ngawinan 28
26. Marmah/Moeslichah	Jemur Ngawinan I/83
27. Handoko	Jemur Andayani XII 33
28. Pangemanan	Tmn Jemursari Selt I/14
29. Fatonah	Jemur Wonosari gg Tembusan
30. Mudjiati	A. Yani 137
31. Ketut Subhawa	Jemursari Utara II/19
32. Tisna Suwondo Ny.	Jemursari Utara III/5
33. M. Afandi	Jemur Wonosari Sekolahan 7
34. Bunadji	Jemur Wonosari gg Mesjid 23
35. Hasim	Jemursari Raya 35
36. Peter Wijaya	Jemur Andayani XIII/26
37. R. Soepratikno	Jemur Wonosari JJ 3
38. Soegio	Jemursari II Blok B 15
39. J. Soumokil	Jemursari A 11
40. Slamet Agus Salim	Jemur Wonosari gg Kyai Mualim



DAFTAR LAMPIRAN:

Responden Kurun Waktu Kedua



DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN KURUN WAKTU KEDUA  
SURABAYA PUSAT

KELURAHAN KALIASIN, KECAMATAN GENTENG

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 01. J.J.H. SOEMODIHARDJO  | JL. TAMAN SIMPANG 10          |
| 02. Ny. MUNASIH / RAMELAN | JL. KEPUTRAN PASAR KECIL I/21 |
| 03. MUDJIATI              | JL. KEPUTRAN PANJUNAN II/51   |
| 04. NY. J. SOEMIHAN       | JL. EMBONG TANJUNG 10         |

KELURAHAN GENTENG, KECAMATAN GENTENG

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 05. MOENAWAR       | JL. GENTENG SIDOMUKTI 43 |
| 06. JOESAR BUDIONO | JL. TUNJUNGAN I/19       |
| 07. NY. SUWANER    | JL. KEBANGSREN V/7       |
| 08. TOKO TERANG    | JL. TUNJUNGAN 57 B       |

KELURAHAN KAPASARI, KECAMATAN GENTENG

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 09. SITI MARYAM                        | JL. GEMBONG II/69           |
| 10. SIE PING /<br>NY. LIAUW ING TJIAUW | JL. PECINDILAN DALAM 22     |
| 11. DASUP                              | JL. NGAGLIK GG KUBURAN 24 A |
| 12. PETRUS MARIA TASRIPIN MAS          | JL. KALISARI SAYANGAN I/1   |
| 13. ABDUL KADIR                        | JL. NGAGLIK V/5             |

KELURAHAN KETABANG, KECAMATAN GENTENG

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 14. TRY FENDY PANGESTU                        | JL. KANGINAN IV/34           |
| 15. DR. ANDREAS SURYA /<br>TJIPTO KARYA UTOMO | JL. JAKSA AGUNG SOEPRAPTO 71 |



KELURAHAN PENELEH, KECAMATAN GENTENG

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 16. P. TALKAH      | JL. JAGALAN VIII/1              |
| 17. TAFIK DARMAWAN | JL. PANDEAN III/26              |
| 18. MATRAMIN       | JL. POLAK WONOREJO GG. LEBAR 17 |
| 19. ASFIAH         | JL. PENELEH I/8 A               |
| 20. DHARMADHI      | JL. PENELEH 76                  |

KELURAHAN DR. SUTOMO, KECAMATAN TEGALSARI

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 21. AGUS PURNOMO              | JL. KUPANG SEGUNTING IV/ 56 C |
| 22. MISKADI (MAKEJO JD.OERIP) | JL. KUPANG SEGUNTING VI/ 6 A  |
| 23. SOEBROTO                  | JL. KUPANG PRAUPAN II/10      |
| 24. TRANGGONO T.              | JL. R.A. KARTINI 4            |
| 25. SATYAWATI ANDAYANI        | JL. IMAM BONJOL 85            |

KELURAHAN KEDUNGORO, KECAMATAN TEGALSARI

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 26. NY. GO SOE PAO/KHO OH NIO | JL. KEDUNGORO 57                   |
| 27. MOCH. ADENAN              | JL. KEDUNG RUKEM IV/42             |
| 28. AGUS PRIYONO              | JL. KALIASIN VIII/17               |
| 29. NURACHMAN                 | JL. PLEMAHAN IX/30                 |
| 30. ZAINAL ARIFIN             | JL. KEDUNG KLINTER VII/15 BELAKANG |

KELURAHAN KEPUTRAN, KECAMATAN TEGALSARI

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 31. MUKRI            | JL. DINOYO LOR V/8        |
| 32. NY. AMSIR POEPAH | JL. DINOYO SEKOLAHAN I/28 |
| 33. DJONO            | JL. DINOYO IX/7           |
| 34. NUNUHITU         | JL. DARMOKALI 20          |
| 35. SARWO SOEBANDI   | JL. DARMOKALI 2 B         |

KELURAHAN TEGALSARI, KECAMATAN TEGALSARI

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 36. DARMINAH       | JL. KEDONDONG KIDUL III/18  |
| 37. SOERYATI       | JL. KEDONDONG KIDUL I/45    |
| 38. MOCHAMAD YASIN | JL. KEDONDONG KIDUL I/103 B |

KELURAHAN WONOREJO, KECAMATAN TEGALSARI

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 39. ACHMAD JASMIN         | JL. WONOREJO II/116            |
| 40. FAUZI NAURIS          | JL. WONOREJO III/28            |
| 41. WACHID (PAULUS WAKIT) | JL. WONOREJO IV/18             |
| 42. EDDY TUKIRIN          | JL. WONOREJO IV/35             |
| 43. JUMILAH               | JL. TEMPEL SUKOREJO I/62 F     |
| 44. SABARI                | JL. KAMPUNG MALANG KULON II/16 |
| 45. HARIYONO KUNAWAN      | JL. TEMPEL SUKOREJO II/14      |

KELURAHAN TEMBOK DUKUH, KECAMATAN BUBUTAN

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 46. MADELAH        | JL. DEMAK JAYA II/24               |
| 47. KAMISAH        | JL. ASEM JAYA VII/19               |
| 48. DEWI NURISAH   | JL. ASEM JAJAR III/31              |
| 49. TARANGGONO     | JL. ASEM BAGUS II/9                |
| 50. SUDARMO        | JL. SEMARANG GG. BELAKANG NO. 41 B |
| 51. DOLOF          | JL. KALIBUTUH BARAT IV/47          |
| 52. HERRY SOEDIBYO | JL. TEMBOK DUKUH IV/21             |

KELURAHAN BUBUTAN, KECAMATAN BUBUTAN

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 53. HASSAN     | JL. MASPATI IV/9     |
| 54. WIRA ALING | JL. TEMBOK LOR II/41 |

KELURAHAN ALON-ALON CONTONG, KECAMATAN BUBUTAN

55. UMMU TUKMIYATI/P. TANIK JL. SULUNG 65
56. DONNIES / ELISA /  
TIO WIE BING JL. TAMBAK BAYAN GG. TENGAH 7
57. HAZAR SINGH JL. PRABAN WETAN IV/29

KELURAHAN GUNDIH, KECAMATAN BUBUTAN

58. H. ABD. ROCHMAN JL. BABADAN VIII/22
59. MULYANTO JL. GUNDIH I/7 B blk.
60. SUPADMI / MOH. ADELAN JL. SUMBER MULYO V/36
61. KOESLAN / ENDANG HARTINI JL. MARGODADI VI/8
62. MISKAN JL. MARGORUKUN X/8
63. SUJONO JL. MARGODADI II/67

KELURAHAN JEPARA, KECAMATAN BUBUTAN

64. ABDULLAH JL. PURWODADI I/96
65. MAT SADJI JL. JEPARA IV/12
66. ABDUL SYUKUR JL. DUPAK BARU III/51 A
67. LUGINAH JL. DUPAK MASIGIT VII/4 A
68. H. MUSTOFA JL. DUPAK JAYA VI/10
69. SUROSO JL. DUPAK JAYA IV/45
70. MUJAELA/MUJI/H. AMIN JL. DUPAK MAGERSARI I/8



KELURAHAN SIMOKERTO, KECAMATAN SIMOKERTO

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 71. SUSANTI / HARTONO /<br>TAN POEI NIO | JL. SIMOKERTO 110        |
| 72. SURYANI BUDIMAN                     | JL. KAPASAN KIDUL I/3    |
| 73. RUSIATI / KADIR                     | JL. KENJERAN IV C / 69   |
| 74. SYAEN                               | JL. GRANTING BARU III/26 |
| 75. ABD. ROCHIM / KUSNAN                | JL. GRANTING I/17 A      |
| 76. SOLIKIN                             | JL. SIDOYOSO KALI 85     |

KELURAHAN KAPASAN, KECAMATAN SIMOKERTO

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 77. DJOKO LESTIONO/<br>GOENARDI WIBISONO | JL. KAPASAN DALAM V/51 |
| 78. SURYA DEWI / SANTOSO                 | JL. DONOKERTO X/16     |
| 79. ALEX KOSASIH                         | JL. GEMBONG SAYURAN 3  |
| 80. SOETIK TJONODRO P.                   | JL. DONOKERTO BARU A.1 |

KELURAHAN SIDODADI, KECAMATAN SIMOKERTO

- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 81. NY. SULASTRI / A LING             | JL. SIDODADI X/57          |
| 82. CHOIRIYAH                         | JL. SIMOLAWANG BARU I/11 A |
| 83. LIUANTONO HANDOKO/<br>LIE KIE JOE | JL. SIDODADI 34            |
| 84. SENIWATI / NJOO SIOE SAN          | JL. KAPASAN 94             |